

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era digital ini, pemasaran barang dan atau jasa menggunakan media iklan secara elektronik sangat digemari oleh para pebisnis dan pengusaha untuk mendongkrak bisnis dan pendapatan atas usaha yang mereka jalankan. Salah satu contoh media digital yang biasanya digunakan adalah *videotron*.

Videotron merupakan alat untuk menayangkan video dengan teknologi digital *light emitting diode* (LED) dengan berukuran besar dan digunakan para pelaku usaha untuk menampilkan konten visual seperti iklan maupun informasi yang biasanya ditempatkan di daerah perkotaan yang ramai seperti di jalan raya, gedung pencakar langit, *body* mobil atau pusat pembelanjaan sehingga dapat terlihat dan terbaca oleh semua orang.

Adapun fungsi dari *videotron* biasanya digunakan sebagai alat promosi untuk jasa, barang ataupun acara tertentu, fungsi kedua dari *videotron* dapat menjadi pusat informasi publik yang menyajikan informasi-informasi sekitar kebutuhan masyarakat luas seperti info penerbangan, info cuaca dan masih banyak lagi. Fungsi selanjutnya sebagai sarana hiburan seperti menayangkan pertandingan olahraga, konser dan lainnya. Keamanan juga termasuk dalam fungsi dari *videotron* dimana digunakan sebagai sarana penting untuk penyampaian kepada masyarakat mengenai informasi peringatan darurat dan yang terakhir penggunaan *videotron* dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan yakni dapat menjadi sarana dalam menampilkan informasi mengenai sejarah suatu daerah misalnya.

Ketika pelaku bisnis memutuskan menggunakan *videotron* sebagai media iklan, maka pada saat itulah harus mulai menghitung komponen biaya apa saja yang harus diperhitungkan salah satunya adalah biaya pajak atas pemasangan *videotron*. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dinyatakan bahwa *videotron* merupakan salah satu

potensi pemasukan daerah yang dapat dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah tempat *videotron* diselenggarakan.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa biaya pajak pemasangan *videotron* merupakan biaya yang wajib dikenakan oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari retribusi yang dikenakan atas pemasangan media iklan, yang besarnya bervariasi disesuaikan dengan ukuran, lokasi serta durasi pemasangan dari *videotron* itu sendiri.

Pengertian Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pelayanan Pajak dalam melaksanakan pelayanan terhadap pengenaan pajak daerah, yang dikepalai oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab penuh terhadap Kepala Dinas. Penulis melakukan kegiatan kuliah kerja nyata pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati, dimana pada UPPPD tersebut juga melakukan pemungutan pajak daerah salah satunya adalah pajak atas biaya pemasangan *videotron*. Sehingga penulis memilih judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame Videotron Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa pendekatan yang mesti diketahui yaitu;

1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati?

1.2.2 Apakah perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* pada Unit pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kramat Jati.

1.3.2 Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat dari penelitian ini yakni:

1.4.1 Untuk penulis/peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* yang terjadi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati.

1.4.2 Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati

Dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan masukan kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati jika perhitungan dan pemungutan yang dilakukan badan tersebut telah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.3 Untuk Wajib Pajak

Diharapkan dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan gambaran mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak reklame yang terjadi di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan penulisan adalah ringkasan pada semua isi laporan yang disusun, terdiri dari bab dan sub bab pada setiap babnya, untuk memberikan

deskripsi mengenai keseluruhan terhadap isi laporan praktek kerja lapangan. Adapun tahapan-tahapan penulis ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini mengenai pokok bahasan mengenai latar belakang. Terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tahapan penulisan dari karya tulis ilmiah mahasiswa yang berjudul mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kramat Jati.

BAB II. LANDASAN TEORI

Isi pada bab ini penulis membahas teori mengenai pajak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah akhir ini guna membahas mengenai topik dari karya tulis ilmiah ini yang bertopik mengenai mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak reklame *videotron* pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kramat Jati.

BAB III. METODE PENELITIAN

Setelah pembahasan mengenai teori pada bab dua, pada bab ini akan membahas mengenai informasi tentang sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan kewajiban, serta kegiatan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kramat Jati yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menunjukkan pembahasan dan analisis dan merupakan data hasil penelitian yang diperoleh pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kramat Jati yang merupakan tempat dilakukan magang kerja penulis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan pada bab empat, penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil pembahasan yang diperoleh dan

memberikan saran jika ada penyimpangan yang terjadi antara praktek yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kramat Jati dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.

